BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship (*Stewardship theory)*

Stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991), menjelaskan bahwa para manajemen berfokus terhadap tujuan utama yaitu kepentingan sebuah organisasi. Dimana teori ini menggambarkan adanya hubungan yang erat antara kepuasan dan kesuksesan sebuah organisasi. Dengan tercapainya sebuah kesuksesan dalam organisasi maka akan tercapai pula pemaksimalisasi utilitas *principals* dan manajemen. Dengan ini teori stewardship dapat diterapkan pada sebuah penelitian akuntansi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lain nya. (Haliah, dalam Jannah 2016).

Secara prinsip akuntansi merupakan alat pengendalian diri, sebagai sarana pelaporan aktivitas manajer atas pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Dengan adanya keterbatasan, pemilik sumber daya menyerahkan amanah pengelolaan sumber daya kepada pihak lain (*stewards*/manajemen) yang lebih siap. Kontrak hubungan antara *principals* dengan *stewards* didasari dengan kepercayaan, kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. *Stewardship theory* merupakan model yang dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik.

Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi

publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) secara bahasa dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban (Ulum 2004). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabannya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Mardiasmo (2002).

Istilah akuntabilitas sering diartikan memiliki makna yang sama dengan *stewardship* yaitu sebagai pertanggungjawaban. Akan tetapi *stewardship* lebih mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisiensi tanpa dibebani kewajiban melaporkan. Sedangkan akuntabilitas pengacu pada pertanggungjawaban oleh seseorang yang diberi amanah kepada pemberi tanggungjawab serta berkewajiban untuk membuat pelaporan pengungkapan secara rinci dan jelas.

3. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ialah bentuk tanggung jawab atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang telah diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku supaya

laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuagan entitas lain. Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 71 pada Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang meupakan prasyarat normatif yang diperlukan supaya laporan keuangan dapat memenuhi kualitas seperti yang diharapkan, yaitu :

1. Relevan

   Laporan keuangan tersebut dibuat tepat waktu dan mengenai informasi yang ada di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan dari pengguna, dengan cara mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini kemudian mengoreksi hasil yang telah di evaluasi di masa lalu.

2. Andal

   Informasi yang dapat dipercaya (Andal) di dalam laporan keuangan pemerintah terbebas dari pengetian yang menyesatkan serta bebas dari adanya kesalahan material, sifatnya netral, serta mampu menyajikan fakta secara jujur dan dapat diverifikasi

3. Dapat Dibandingkan

   Informasi akuntansi harus bisa dibandingkan dengan informasi akuntansi periode sebelumnya pada entitas yang sama atau sejenis pada periode waktu yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang

sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang diberikan di dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan telah dibuat dengan istilah serta disesuaikan dengan pemahaman pengguna, supaya pengguna dapat mengerti apa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut sehingga dapat di interpretasikan. Maka dari itu, dalam penyajian informasi dalam laporan keuangan sendiri harus dengan format istilah yang telah disesuaikan dengan pemahaman pengguna laporan keuangan tersebut.

4. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Permendagri No. 59 Tahun 2007 bahwa, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) ialah suatu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran hingga pelaporan keuangan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem akuntansi pemerintahan (sektor publik) memiliki tiga tujuan pokok (Nordiawan, 2008) yaitu:

a. Pertanggung jawaban
b. Manajerial
c. Pengawasan

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah bertujuan guna untuk meninggkatkan akuntabilitas dan

keandalan dari pengelola keuangan pemerintah dengan melakukan penyusunan serta pengembangan SAP (Halim, 2008). Di Dalam Akuntansi Pemerintah daerah sendiri, sistem akuntansi yang digunakan adalah desentralisasi, desentralisasi sebagai perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah, manajemen, dan pengambil keputusan dari tingkat nasional hingga ke tingkat daerah (Bastian, 2006). SAKD atau Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memiliki bebe-rapa karakteristik (Nordiawan, 2008), diantaranya:

a. Basis akuntansi
b. Sistem pembukuan

5. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Di dalam pengelolaan keuangan daerah, SKPD harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. di dukung dengan adanya latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan tentunya. Sehingga dalam penerapan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut nantinya dirasa mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah biasanya dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan adanya ketidaksesuaian laporan dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Ihsanti, 2014).

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan kepemilikannya akan pendidikan, pelatihan, serta pengalaman yang cukup

memadai. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaigus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi misi serta tujuan dari organisasi itu sendiri. Sumber daya manusia ialah salah satu elemen organisasi yang dirasa penting, maka dari itu harus dipastikan jika pengelolaan sumber daya manusia teah dilakukan sebaik mungkin supaya mempu memberikam kontribusi yang optimal dalam pencapaian tujuan organisasi (Lusi, 2014).

6. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Menurut Mahmudi (2010) definisi dari sistem pengendalian intern ialah sebuah proses integral dari sebuah tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dan jajarannya dengan maksud untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan juga ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan cara untuk adanya pengarahan,pengawasan, dan pengukutran suatu sumber daya sebuah organisasi, dan mempunyai peran yang penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan.

Menurut Mahmudi (2007) dalam Fathinah (2014) Komponen penting dalam pengendalian intern adalah :

(1) sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu

(2) Otorisasi dalam system akuntansi pemerintah daerah dirasa penting, karena tanpa system otorisasi yang baik keuangan daerah beresiko adanya kebocoran.

Sistem otorisasi memperlihatkan tentang ketentuan orang atau pejabat yang mempunyai tanggung jawab mengotorsasi suatu transaksi yang adadi pemerintah daerah. Otorisasi sendiri dapat berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada folmulir dan dokumen tertentu. Tanpa adanya otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan atau transaksitanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan ilegal atau tidak sah.

(3) Formulir, dokumen, dan catatan. Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan.

(4) Pemisahan tugas, Fungsi-fungsi atau pihak pihak yang terkait dalam suatu transaksi dalam suatu transaksi harus dipisahkan.

7. Teknologi Informasi

Teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi untuk mengolah data, memproses, menyusun, menyimpan, mendapatkan, memanipulasi data dalam beberapa cara dengan tujuan untuk mendapatkan hasil informasi berkualitas, informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Kemudian digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, hingga pemerintahan serta hasil tersebut merupakan informasi yang strategis untuk dijadikan sebagai salah satu cara pengambilan keputusan. Yang kemudian Teknologi informasi sendiri untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi. Meliputi, computer, perangkat lunak, database, jaringan,

electronic commerce, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan teknologi (Wilkinson 2000 dalam Arfianti, 2011).

Peraturan Pemerintah No 56 pada Tahun 2005 mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah yaitu untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelola keuangan daerah kepada pelayanan publik. Dalam pemerintah sendiri perlu adanya optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan system informasi manajemen (Nurillah, 2014).

B. Hasil penelitian terdahulu

No	**Peneliti dan Tahun**	**Variabel**	**Hasil Penelitian**
1.	Nurillah dan Muid (2014)	Dependen : Kualitas LKPD Independen : Kompetensi SDM, SAKD, Pemanfaatan Teknologi, dan Sistem Pengendalian Intern	kompetensi SDM, penerapan SAK ,pemanfaatan teknologi informasi ,sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2.	Kadek Desiana, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati (2014)	Dependen : Kualitas LKPD Independen : Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah

No	Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
3.	Bayu Dharma (2013)	Dependen : Kualitas LKPD Independen : Kompetensi SDM, Penerapan SPIP, dan Penerapan SAP	Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
4.	Atikah Fathinah (2014)	Dependen : Kualitas LKPD Independen : Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern, Motivasi Kerja	Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Manajemen, dan Motivasi Kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah
5.	Angga Dwi Permadi	Dependen : Kualitas LKPD Independen : Penerapan SAKD	sistem akuntansi keuangan daerah berpenaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah
6.	Putri Rusmiadi, Ari Surya Darmawan, Werastuti (2015)	Dependen : Kualitas LKPD Independen : Kualitas SDM berdasarkan Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern	kualitas SDM bidang akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
7.	Dian Irmadiani (2014)	Dependen : Kualitas LKPD Independen : Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan SAKD, Peran Internal Audit	sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap

No	Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
			kualitas laporan keuangan pemerintah.
8.	Yogi Merta Maekasari, Pradana Adiputra, Edy Sujana (2014)	Dependen : Kualitas LKPD Independen : Pemahaman SAP, dan Pemahaman SIAKD	pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
9.	Irfan Ikhwalul (2012)	Pemanfaatan Teknologi informasi, pengawasan Keuangan Daerah	Pemanfaatan Teknologi informasi, pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah
10.	Lusi Novita Sari (2014)	Dependen : Kualitas LKPD Independen : Kapasitas SDM, Peran Auditor Intern.	Kapasitas sumber daya manusia, Peran Auditor Intern berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Kerinci.

No	Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
11.	Ni Made Sudiarianti, I Gusti Ketut Agung Ulupui, I G A Budiasih (2015)	Dependen : Kualitas LKPD Independen : Kompetensi SDM pada penerapan SPIP dan Standar Akuntansi Pemerintahan.	Kompetensi SDM, penerapan SPIP, SAP berpengaruh positif pada kualitas LKPD
12,	Ari Udiyanti, Ananta Wikrama, Ary Surya Dharmawan (2015)	Dependen : Kualitas LKPD Independen : Penerapan SAP, Sistem Pengendaliaan Intern, dan Kompetensi Staf Akuntansi.	Standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf akuntansi secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
13.	Emilda Ihsanti (2014)	Dependen : Kualitas LKPD Independen : Kompetensi SDM, dan Penerapan SAKD.	Sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan sedangkan Penerapan SAKD tidk berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
14.	Dewi Andini (2015)	Dependen : Kualitas LKPD Independen : Kompetensi SDM, dan Penerapan SAKD.	Sumber daya manusia dan Penerapan SAKD berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

No	Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
15.	Dzulfikar Ahli Fikri (2015)	Dependen : Kualitas LKPD Independen : Kompetensi SDM, SPI dan SAP	Sumber daya manusia, SPI, dan SAP berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

C. Hipotesis

Hubungan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Sesuai dengan tujuan otonomi daerah, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan baik supaya hak dan kewajiban daerah dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah itu sendiri. Di dalam Peraturan Pemerintah No 58 pada Tahun 2005 pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, effisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab tanpa melupakan dan memperhatikan adanya asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat (Nurillah dan Muid 2014).

Penelitian sebelumnya dilakukan Permadi (2013), Nurilah dan Muid, Andini dan Yusrawati (2014) menunjukkan hasil bahwa penerapan sistem akuntansi daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan Keuangan daerah.

H_1 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Proses dari sebuah pembelajaran akan menghasilkan kompetensi, dengan adanya pembelajaran maka aka nada kemungkinan-kemungkinan dari tiap individu untuk memperoleh keterampilan, sikap, dan perilaku. Untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan kompetensi yang memadai. Kompetensi yang dimiliki pegawai atau pejabat keuangan dapat mempengaruhi tingkat keuangan laporan keuangan yang dihasilkan. (Fikri, 2015). Penelitian sebelumnya dilakukan Sudiarianti, dkk (2015), Nurilah dan Muid (2014), Andini dan Yusrawati (2015) menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan Keuangan daerah.

H_2 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hubungan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 menyatakan bahwa “untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,

menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan". Penelitian sebelumnya dilakukan Sudiarianti, dkk (2015), Nurilah dan Muid (2014) serta Indrasari dan Nahartyo (2008) membuktikan bahwa pengendalian akuntansi pemerintah daerah mempunyai pengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah, di nyatakan dengan ketepatan waktu dan keterandalan. Penelitian yang sama dilakukan Fikri (2015) bahwa sistem pengendalian intern menunjukkan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan.

H_3 : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Peraturan Pemerintah No 56 pada Tahun 2005 mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah yaitu untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelola keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Dalam pemerintah sendiri perlu adanya optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen. Serta pemanfaatan teknologi informasi sendiri dapat meminimalisasi adanya kesalahan-kesalahan dalam pengolahan data, dikarenakan aktivitas

pengelolaan keuangan akan tercatat secara sistematis dan pada akhirnya mampu menyajikan laporan keuangan yang handal.

Penelitian sebelumnya dilakukan Priyamana, dkk (2014) serta Nurilah dan Muid (2014) menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan Keuangan daerah.

H_4 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
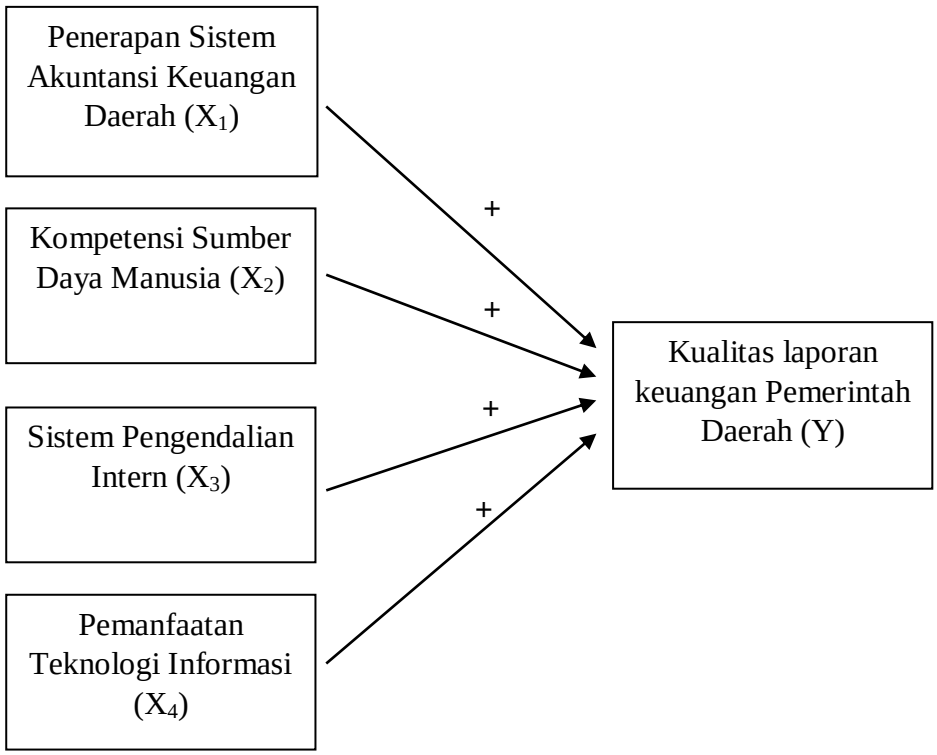
D. Model Penelitian